

## ABSTRAK

Munculnya berbagai peraturan baru dalam bidang pemerintah daerah membuat pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten harus segera bisa menerapkannya. Namun, hal ini tidaklah mudah. Contohnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang hingga tahun anggaran 2006 masih menerapkan sistem akuntansi berdasarkan Kepmendagri 29/2002. Penerapan sistem ini harus dievaluasi secara periodik. Salah satu penilaian yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi sistem akuntansi menurut Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Dalam penerapan sistem akuntansinya ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki SPI yang masih lemah dalam beberapa bagian. Salah satunya disebabkan oleh belum ditetapkannya *standard operating procedure* tentang sistem dan prosedur akuntansi yang diatur ke dalam Perda.

Selain itu, adanya interpretasi berbeda dalam hal teknis membuat pelaksanaan sistem akuntansi antar pemerintah daerah jadi tak seragam. Terutama kini pemda lebih berfungsi sebagai konsolidator dalam penyusunan laporan keuangan dengan munculnya tanggungjawab sebagai entitas pelaporan (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD) dan entitas akuntansi (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD). Berbagai dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntansi mulai *input*, proses hingga *output* pun dinilai belum menyajikan informasi secara lengkap. Semua ini karena basis Kepmendagri No 29 tahun 2002 belum menjelaskan secara detail teknik pelaksanaan di lapangan hingga ke dokumen sumber pemerintah daerah. Sedangkan pada Permendagri No 13 tahun 2006 telah mengatur secara detail hingga pada contoh dokumen yang dibutuhkan oleh satuan kerja (satker).

Tujuan dari dilakukannya evaluasi sistem akuntansi menurut SPI adalah untuk menjaga kekayaan daerah dari kecurangan maupun kelalaian. Penilaian atas unsur-unsur SPI ini juga berguna bagi proses audit oleh pihak ekstern, dalam hal ini adalah BPK. Semakin memadai SPI pemerintah daerah, maka semakin mudah pula pihak pemda memperoleh *unqualified opinion* dalam laporan audit mereka.

Kata-kata kunci : Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah